



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR : 16 TAHUN 2004 SERI : D**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR 17 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA  
DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN BANYUMAS**

**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR : 16 TAHUN 2004 SERI : D**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR 17 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA  
DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN BANYUMAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANYUMAS,**

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan dengan telah diintegrasikannya bidang kesejahteraan sosial dengan bidang pemberdayaan masyarakat maka tugas pokok, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Banyumas sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2002 sudah tidak sesuai lagi;

- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  3. Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
6. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 01/SKB/M.PAN/4/2003 Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANYUMAS**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN,  
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS  
KESEHATAN KABUPATEN BANYUMAS.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas.
4. Bupati adalah Bupati Banyumas.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah pelaksana sebagian tugas Dinas Kesehatan yang wilayah kerjanya dapat meliputi lebih dari satu Kecamatan.
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam Satuan Organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN**

**Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Kesehatan.

**BAB III**

**KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

**Pasal 3**

Dinas Kesehatan adalah unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Pasal 4**

- (1) Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan di bidang kesehatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Dinas Kesehatan mempunyai fungsi:

- a. peramusan kebijakan teknis di bidang kesehatan;
- b. penyusunan rencana dan program kerja dinas;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan, pembinaan dan pengawasan di bidang kesehatan;
- d. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang kesehatan;
- e. pelaksanaan inventarisasi, pendataan dan pemutakhiran data;
- f. penyiapan dan pemberian informasi di bidang kesehatan;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi pemerintah dan swasta;
- h. pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
- i. pembinaan terhadap UPT dalam lingkup tugasnya;
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

## BAB IV

### SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
    - 1. Sub Bagian Umum;
    - 2. Sub Bagian Keuangan dan Bina Program.
  - c. Bidang Informasi dan Perencanaan Kesehatan, terdiri dari:
    - 1. Seksi Informasi Kesehatan;
    - 2. Seksi Perencanaan Pembangunan Kesehatan.
  - d. Bidang Pembinaan Kesehatan Masyarakat, terdiri dari:
    - 1. Seksi Promosi Kesehatan;
    - 2. Seksi Gizi Masyarakat.
  - e. Bidang Upaya Pelayanan Kesehatan, terdiri dari:
    - 1. Seksi Kesehatan Dasar;
    - 2. Seksi Bina Sarana Pelayanan Kesehatan.
  - f. Bidang Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan, terdiri dari:
    - 1. Seksi Pemberantasan Penyakit Menular;
    - 2. Seksi Penyehatan Lingkungan.
  - g. UPT;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB V**

### **TATAKERJA**

#### **Pasal 6**

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati.

#### **Pasal 7**

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan kerja masing-masing maupun dengan unit kerja lainnya sesuai dengan tugas pokoknya.

#### **Pasal 8**

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi pada Dinas Kesehatan wajib mengkoordinasikan bawahannya dengan memberikan pedoman, bimbingan, pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan tugasnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi pada Dinas Kesehatan wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala.

#### **Pasal 9**

Tugas pokok, fungsi, uraian tugas dan tatakerja Kepala Dinas, Bagian Tata Usaha, Bidang, Sub Bagian, Seksi, UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Kesehatan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 10**

- (1) Struktur Organisasi dan Tatakerja Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Banyumas yang telah ada pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, masih tetap berlaku sampai dengan pengisian formasi jabatan berdasarkan Peraturan Daerah ini dilaksanakan.
- (2) Paling Lama dalam waktu 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, pengisian formasi jabatan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) harus sudah dilaksanakan.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 11**

- (1) Pembentukan, tugas pokok dan fungsi UPT diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;
- (2) Pada UPT dapat dibentuk satuan organisasi di bawah Kepala UPT yang dipimpin oleh pejabat struktural yang pembentukan, tugas pokok, fungsi, uraian tugas dan rincian tugasnya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 12**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 31 Mei 2004

**DUPATI BANYUMAS**

ttd.

**ARIS SETIONO**

Diundangkan di Purwokerto  
pada Tanggal 1 Juni 2003

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
BANYUMAS**

ttd.

**SINGGIH WIRANTO, SH.**  
NIP. 500.086.384

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 16  
SERID

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN BANYUMAS**

Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas  
Nomor 17 Tahun 2004  
Tanggal 31 Mei 2004

